



LEMBARAN KALURAHAN PONJONG
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 08

TAHUN : 2025

PERATURAN KALURAHAN PONJONG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PONJONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 2 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12,13 ,14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 tanggal 10 Desember 2025

- tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 5 tahun 2019 tentang Kewenangan desa (Lembar Kalurahan Ponjong tahun 2019 Nomor 3);
 19. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Ponjong Tahun 2022-2027 (Lembar Kalurahan Ponjong Tahun 2022 nomor 2);
 20. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Ponjong tahun Anggaran 2026 (Lembar Kalurahan Ponjong Tahun 2024 nomor 2);
 21. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ponjong Tahun 2025 nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PONJONG
Dan

LURAH PONJONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---|
| 1. Pendapatan Kalurahan | : Rp. 4.655.344.800,00 | |
| 2. Belanja Kalurahan | : <u>Rp. 4.485.442.000,00</u> | - |
| Surplus/Defisit | : Rp. 169.902.800,00 | |
| 3. Pembiayaan Kalurahan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 10.097.200,00 | |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : <u>Rp. 180.000.000,00</u> | - |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | : (Rp. 169.902.800,00) | |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2025.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBD Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBD Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ponjong.

Ditetapkan di Ponjong
Pada tanggal 31 Desember 2025
LURAH PONJONG

ttd

ARIF AL FAUZI

Diundangkan di Ponjong
pada tanggal 31 Desember 2025
CARIK PONJONG

ttd

WAKHID ARYANTO
LEMBARAN KALURAHAN PONJONG TAHUN 2025 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	136.723.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.516.621.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.655.344.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	843.129.876,16	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.701.240.245,84	
5.3.	Belanja Modal	1.891.471.878,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	49.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.485.442.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	169.902.800,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.097.200,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.097.200,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	180.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	180.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(169.902.800,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ponjong, 30 December 2025

Lurah

ARIF AL FAUZI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	136.723.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.516.621.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.655.344.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.231.721.929,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	982.112.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	684.004.100,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	684.004.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.217.996,16	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.217.996,16	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	62.868.383,84	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.868.383,84	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.197.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.197.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.120.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.493.840,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.493.840,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	103.343.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	800.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.193.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.193.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	90.000.000,00	DDS, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	6.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.800.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	550.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.913.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.185.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.185.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.390.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.390.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.808.000,00	PBH, PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.808.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.175.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	355.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.108.829,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.040.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	6.360.000,00	ADD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.360.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.650.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.540.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.540.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.530.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.080.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.563.829,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.563.829,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.235.000,00	DDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.235.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.610.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.610.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	5.500.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.000.000,00	DLL
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	68.245.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	60.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	3.245.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.245.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.551.252.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	195.749.950,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	38.805.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.805.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.955.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.955.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.861.750,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.861.750,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	55.630.000,00	PBP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.630.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	2.585.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.585.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.418.200,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.418.200,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	17.500.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	62.995.000,00	DDS, PBP
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.995.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.927.844.250,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	94.687.174,00	DDS, PAD
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	94.687.174,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	234.644.722,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	234.644.722,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	1.500.000.000,00	DDS, PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	1.500.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	98.512.354,00	DDS, PAD
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	98.512.354,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	386.375.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	328.875.000,00	PAD, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.875.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	57.500.000,00	ADD, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.325.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.325.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	22.058.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	22.058.000,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.058.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>79.037.871,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.240.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.280.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.405.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.405.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.540.000,00	DDS, PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	2.015.000,00	DDS, PAD
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.015.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.595.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	7.745.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.745.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	13.850.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.850.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	24.762.871,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.702.871,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.702.871,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.800.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.375.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.885.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.885.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.440.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.890.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.465.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.465.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.560.000,00	DDS, PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	2.890.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.985.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.985.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.650.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>573.830.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	551.540.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	550.000.000,00	PBP
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	373.527.650,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	176.472.350,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	1.540.000,00	DDS, PAD
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.220.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.630.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.630.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.590.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.580.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	1.290.000,00	DDS, PAD
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	1.290.000,00	DDS, PAD
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.370.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.370.000,00	DDS, PAD, PBP
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.370.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.120.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.120.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>49.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	39.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.485.442.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	169.902.800,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	10.097.200,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	180.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(169.902.800,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ponjong, 30 December 2025

Lurah

ARIF AL FAUZI

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			4.655.344.800,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			136.723.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			45.173.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			45.173.000,00
	01. Bagi Hasil SHU BUMKal Hanyukupi Tahun 2025	PAD	1 Ls	35.000.000,00
	02. Bagi hasil surplus pendapatan BUMKALMA	PAD	1 Ls	10.000.000,00
	03. SHU Penyertaan Modal BUMKALMA Sumbarinten	PAD	1 Ls	173.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			6.000.000,00
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			6.000.000,00
	01. Sewa kios milik kalurahan	PAD	8 Ls	750.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			85.550.000,00
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa			60.000.000,00
	01. PTSL	PAD	400 Bidang	150.000,00
4.1.4.96.	Hasil pengelolaan tanah kas desa			25.550.000,00
	01. Sewa tanah untuk sekolah, pustu dan pertanian	PAD	1 Ls	25.550.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			4.516.621.800,00
4.2.1.	Dana Desa			900.000.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			900.000.000,00
	01. Dana Desa tahun 2026	DDS	1 Ls	900.000.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			126.970.400,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			126.970.400,00
	01. Bagi hasil pajak	PBH	1 Ls	94.827.500,00
	02. Bagi hasil retribusi	PBH	1 Ls	32.142.900,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			894.651.400,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			894.651.400,00
	01. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2026	ADD	1 Ls	894.651.400,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			2.595.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			2.595.000.000,00
	01. BKK Balai Cagar Budaya	PBP	1 Ls	1.500.000.000,00
	02. BKK Reformasi Birokrasi	PBP	1 Ls	120.000.000,00
	03. BKK Inovasi	PBP	1 Ls	100.000.000,00
	04. BKK RTLH Gaya Arsitektur Yogyakarta	PBP	1 Ls	325.000.000,00
	05. BKK Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan	PBP	1 Ls	550.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			2.000.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			2.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.000.000,00
	01. Bunga Bank tahun 2026	DLL	1 Ls	2.000.000,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH PENDAPATAN			4.655.344.800,00
Disetujui, Lurah ARIF AL FAUZI		Ponjong, 30 December 2025 Carik WAKHID ARYANTO		

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>10.097.200,00</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			<u>10.097.200,00</u>
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			10.097.200,00
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa PAD	Ls	0,00	0,00
	02. SILPA Alokasi Dana Desa ADD	1 Ls	2.400.000,00	2.400.000,00
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN) DDS	1 Ls	7.697.200,00	7.697.200,00
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah PBH	1 Ls	0,00	0,00
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota PBK	1 Ls	0,00	0,00
	06. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi PBP	1 Ls	0,00	0,00
	07. SILPA Swadaya Masyarakat SWD	1 Ls	0,00	0,00
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain DLL	1 Ls	0,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			<u>180.000.000,00</u>
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			<u>180.000.000,00</u>
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			180.000.000,00
	01. Penyertaan Modal Bumkal Hanyukupi (Ketapang 20 %) DDS	1 Ls	180.000.000,00	180.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO			<u>169.902.800,00</u>
Disetujui, Lurah		Ponjong, 30 December 2025 Carik		
ARIF AL FAUZI		WAKHID ARYANTO		